

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : BUMD Tidak Sehat di Jawa Barat Diusulkan Dilikuidasi
Entitas / Cakupan : Kota Bandung
Sumber / Hal : Kompas/ Hal. 21
Edisi : Rabu, 25 April 2018

BUMD Tidak Sehat di Jawa Barat Diusulkan Dilikuidasi

BANDUNG, KOMPAS — DPRD Jawa Barat mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jabar agar melikuidasi sejumlah badan usaha milik daerah yang dinilai tidak sehat atau sulit dikembangkan dari sisi kinerja. Ada 13 BUMD di lingkungan Pemprov Jabar.

Ketua Panitia Khusus DPRD Jabar I Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2017 dan Akhir Masa Jabatan Gubernur Jabar 2013-2018 Gatot Tjahyono, di Bandung, Selasa (24/4/2018), mengatakan, setidaknya ada dua badan usaha yang perlu dievaluasi, yakni Perusaha-

an Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP) dan PT Agronesia.

"PDAP sudah lama tidak beroperasi dan Agronesia sulit dikembangkan lagi. Kami mengusulkan dua badan usaha ini diakuisisi, dilikuidasi, atau digabung saja. Beban utang sangat tinggi, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. BUMD itu tak mampu memberikan kontribusi pada PAD (pendapatan asli daerah), bahkan terus rugi," kata Gatot.

Menurut Gatot, dari 13 BUMD, sebagian besar bermasalah de-

ngan kinerja, antara lain, manajemen kurang bagus, dalam hal kompetensi sumber daya manusia serta membaca peluang.

Pemprov Jabar melakukan berbagai upaya pembenahan. Sejumlah BUMD sudah mengalami perbaikan, seperti PT Tirta Gemah Ripah, PT Jamkrida Jabar, dan PT Migas Hulu Jabar yang kini mengebor sumur eksplorasi KKK-1 di blok Offshore North West Java bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Energi.

Menurut Gatot, jika sejumlah BUMD dilikuidasi, pegawai yang sudah tua bisa pensiun dini. Ada-

pun pegawai muda dan berpotensi dialihkan ke BUMN lain.

Dari 13 BUMD, yang dapat memberikan kontribusi PAD signifikan baru tiga badan usaha, yakni PT Jaswita Jabar yang bergerak di perhotelan dan mal, properti, otomotif dan perbengkelan, serta bisnis jasa. Selain itu Bank Jabar Banten yang mempunyai nilai aset sekitar Rp 110 triliun dan laba Rp 300 miliar-Rp 350 miliar per tahun dan PT Jasa Sarana dengan laba Rp 11 miliar.

Gatot mengapresiasi relatif besarnya investasi penanaman modal asing dan penanaman modal

dalam negeri di Jabar, mencapai Rp 400 triliun. Tapi, ketimpangan tenaga kerja relatif besar.

Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi capaian Pemprov Jabar, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur dan kemasyarakatan, salah satunya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka.

Gubernur Jabar Ahmad Herawan menyatakan terus membenahi BUMD. "Pembenahan sejak 2008. Sebagian besar BUMD sudah sehat, sebagian lain dalam penyehatan," katanya. (SEM)